

REINTERPRETASI GERAKAN DAKWAH FRONT PEMBELA ISLAM (FPI)

Machfud Syaefudin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan

Email: dju_mach4@yahoo.co.id

Abstract

Front Pembela Islam (FPI) is an Islamic socio-religious organization group in Indonesia. The members' preaching ways are considerably radical, and often has appalled many people, especially in implementing "amar ma'ruf nahi munkar". These radical actions have caused some fear, even violated human rights for some members of the community. This study, then, presents the facts by looking further interactions and implications of FPI's social movement in da'wah activities. Thus, the symbol and propaganda on "amar ma'ruf nahi munkar" are possibly reconsidered based on the social conditions of surrounding communities. Taking an action as a law enforcer of values, norms, and social order in the community means neglecting the responsibility of the government.

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah kelompok organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia. Cara berdakwah para anggota FPI yang radikal, sering menimbulkan terkejut banyak orang, terutama dalam menerapkan "amar ma'ruf nahi munkar". Tindakan radikal yang dilakukan oleh FPI telah menyebabkan rasa takut, bahkan melanggar hak asasi manusia (HAM) untuk beberapa anggota masyarakat. Dengan demikian penelitian ini menyajikan beberapa fakta dengan memperhatikan interaksi lebih lanjut dan implikasi dari gerakan sosial FPI dalam kegiatan dakwah. Dengan demikian, simbol dan propaganda tentang "amar ma'ruf nahi munkar" perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi sosial masyarakat sekitar. Mengambil tindakan sebagai penegak hukum, nilai-nilai, norma-norma dan tatanan sosial di masyarakat berarti mengabaikan tanggung jawab pemerintah.

Keyword: Front for Defenders of Islam (FPI), da'wah amar ma'ruf nahi munkar.

A. Pendahuluan

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah nama ormas yang tidak asing di telinga kita. Organisasi ini dengan cepat populer di Indonesia sejak beberapa tahun belakangan. Kelompok Front Pembela Islam (FPI) sering muncul di berbagai media massa dalam pemberitaan yang luar biasa. Hal ini berhubungan erat dengan kegiatan utama mereka, yaitu melakukan aksi-aksi "penertiban" (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada bulan Ramadan, dan seringkali berujung pada kekerasan.

FPI yang kini dipimpin Habib Rizieq, memiliki rekam jejak kekerasan yang cukup panjang. Ada Peristiwa Monas, ada peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap kelompok Ahmadiyah. Mereka tak lelah menuntut pembubaran Ahmadiyah yang dipandang sebagai umat yang sudah keluar dari Islam, mereka (FPI) bahkan pernah mengancam akan melakukan revolusi jika presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) tak kunjung membubarkan kelompok Ahmadiyah. Front Pembela Islam (FPI) ini juga pernah melakukan demonstrasi dan merusak kantor Kemendagri (Kementerian dalam Negeri) menuntut tidak dicabutnya *perda* anti-miras di sembilan daerah.¹

Bukan hanya itu, mereka (FPI) juga menolak keras rencana kedatangan Lady Gaga ke Jakarta. Penyanyi asal Amerika Serikat itu yang direncanakan akan menggelar konser di Stadion Gelora Bung Karno GBK, Senayan, Jakarta, 3 Juni tahun 2012.² Belakangan terakhir, Kamis 18 Juli 2013 yang lalu, FPI kembali melakukan *sweeping* terhadap apa yang mereka anggap sebagai kemaksiatan di tengah masyarakat di Sukorejo Kendal (Jawa Tengah). Tetapi, kali ini, mereka 'kena-batu'nya, masyarakat setempat melawan dan menyerang balik konvoi anggota FPI.³ Aksi semacam ini terjadi di ragam waktu dan tempat namun dengan pola yang sama yaitu melibatkan tindakan kekerasan.

Atas dasar kenyataan tersebut, penulis akan memperdalam kajian tersebut dengan melihat lebih jauh interaksi dan implikasi sosial gerakan dakwah yang dilakukan FPI dalam aktivitasnya di masyarakat. Adapun persoalan pokok yang menjadi fokus kajian makalah ini adalah: Siapa dan

¹ http://www.wahidinstitute.org/wahid-id/images/upload/dokumen/40_mrori_bahasa.pdf, 2012, di akses tanggal 7 Juni 2013.

² <http://blog.unikom.ac.id/10507276/4ph.front-pembela-islam-fpi--kalo-pengin-jakarta-chaos-silakan-gelar-saja-konser-lady-gaga.html/> 2012, di akses tanggal 10 Juni 2013.

³ <http://socio-politica.com/2013/07/24/fpi-sebagai-duri-dalam-daging-di-tubuh-bangsa/>, diunduh tanggal 25 Nopember 2013

bagaimana latar belakang lahirnya organisasi FPI?, bagaimana karakteristik, tujuan, interpretasi ajaran, dan agenda perjuangan gerakan dakwah FPI?, siapakah yang berhak menegakkan *amar makruf nahi munkar*, Negara atau Ormas?, Apakah gerakan FPI ini murni menegakkan *amar makruf nahi munkar*?, dan bagaimana reinterpretasi dakwah yang perlu diagendakan?. Untuk menjelaskan dan mengurai pokok permasalahan tersebut, penulis akan melakukan pembacaan dengan pendekatan teori fundamentalisme.

B. Fpi Dan Agenda Perjuangannya

1. Latar Belakang dan Tujuan Berdirinya FPI

Pemilihan nama "Front Pembela Islam" ini memiliki makna tersendiri. Kata *front* yang berarti "depan", menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kemudian kata "*pembela*" mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata "*Islam*" mencirikan bahwa perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama "*Front Pembela Islam*", organisasi ini akan membela "*nilai*" dan "*ajaran*", Islam, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu.⁴

Organisasi FPI secara resmi berdiri pada tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiuts Tsani 1419 H, di pondok pesantren Al-Um Kampong Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. FPI ini didirikan oleh sejumlah *haba'ib, ulama', muballigh*, serta aktivis muslim dan umat Islam. Tokoh yang memelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab. Tidak hanya di Jakarta, seiring berjalannya waktu, simpatisan Front Pembela Islam (FPI) bertambah banyak dan mendirikan FPI di daerah-daerah, Seperti di Surakarta, Bandung dan Yogyakarta hingga hampir di setiap kota di Indonesia.⁵

Latar belakang situasi sosial-politik berdirinya FPI antara lain; *Pertama*, adanya penderitaan panjang yang di alami umat Islam Indonesia sebagai akibat adanya pelanggaran HAM yang di lakukan oleh oknum penguasa. *Kedua*, kegagalan aparat Negara untuk menegakkan hukum dan menjamin ketertiban masyarakat, *ketiga*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk

⁴ Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 132

⁵ *Ibid*, hlm. 130

menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam. *Keempat*, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan *amar makruf nahi munkar*. Tampaknya, latar belakang kelahiran FPI tersebut tidak bisa lepas dari peristiwa reformasi sebagai momentum perubahan sosial politik di Indonesia.⁶

Selanjutnya tujuan berdirinya FPI, sebagaimana tertulis dalam dokumen risalah dan garis perjuangan FPI, adalah untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*, dan untuk membantu pemerintah dalam menumpas problem sosial kemasyarakatan, seperti prostitusi, perjudian, serta transaksi miras dan narkoba. Menurut para aktivis FPI, salah satu upaya yang bisa ditempuh untuk menanggulangi krisis moral yang melanda bangsa ini adalah dengan melakukan kerja sama yang harmonis dari seluruh elemen masyarakat, yang meliputi kaum *ulama, umaro*, dan seluruh umat Islam. Untuk merealisasikan tujuan organisasi, dan dalam upaya memaksimalkan kerja organisasi, FPI membentuk dua struktur organisasi, yakni *Jamaah FPI*, dan *Laskar FPI*. Jamaah FPI ini melaksanakan kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian, bakti sosial, dan pendidikan. Sedangkan Laskar FPI bertugas melakukan *pressure* fisik untuk penyerbuan tempat hiburan, *sweeping*, dan demonstrasi. Laskar ini lebih menyerupai militer atau milisi di bawah komando sang ketua umum FPI. Sebagai doktrin kepada pengikut gerakan FPI bahwa pemimpin mereka adalah para *haba'ib* dan ulama yang merupakan cerminan orang-orang suci yang mendapat legitimasi agama.⁷

2. Doktrin dan Praktik Keagamaan FPI

Asas FPI sebagaimana yang terdapat dalam dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, adalah *Islam ala ahlussunnah wal jamaah* (aswaja) (Al-Zastrouw Ng, 2006). Menurut para pemimpin FPI, aswaja yang dipahami oleh FPI tidaklah sama dengan yang dipahami oleh kalangan Nahdlotul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah. Aswaja dalam pandangan FPI adalah mereka yang telah sepakat untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana tertera dalam al-Quran dan al-Hadits dan mereka itu adalah para sahabat dan *tabi'in* (orang yang belajar dari sahabat dalam pemahaman dan pengambilan ilmu). Paham kelompok Aswaja ini berusaha menjaga otentisitas agama, sampai pada hal-hal yang sifatnya simbolik. Perbedaan atas ritus dan simbol dianggap sebagai penyimpangan ajaran agama. Dalam pemahaman

⁶Al-Zastrouw Ng, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm 90.

⁷ *Ibid*, hlm. 95

kelompok ini, paham keagamaan para sahabat harus dipegang kuat, karena Allah dan Rasulnya banyak sekali memberi penjelasan tentang kemuliaan para sahabat, bahkan memujinya.⁸ Dengan demikian paham keagamaan FPI ini tergolong bersifat *skripturalis-simbolis*, yakni menjaga ajaran sampai pada dataran yang paling simbolik, meski hal itu harus dilakukan dengan melanggar substansi dari ajaran itu sendiri.

3. Munculnya Gerakan Dakwah FPI di Indonesia.

Gerakan Islam yang sedang bangkit pasca lengsernya orde baru ditandai oleh dua tipikal, yakni *structural* dan *kultural*. Tipikal pertama ditandai dengan maraknya pendirian partai-partai Islam sebagian memperjuangkan sebagai nilai etik, prinsip dasar dan semangat kebangsaan. Sedangkan tipikal kedua ditandai dengan menjamurnya sejumlah gerakan ormas Islam, mereka melakukan gerakan memberantas berbagai kemaksiatan dengan dalih menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, seperti yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).⁹

Reformasi yang mengusung kebebasan untuk mengekspresikan ide dan pemikiran sekontroversial apapun menjadi semacam pupuk bagi tumbuh suburnya gerakan-gerakan radikal yang Selama ini kurang mendapatkan ruang efektif untuk berkembang. Perkembangan kelompok-kelompok radikal dengan berbagai model dan bentuk, gerakan dan simbol tumbuh subur semenjak bergulirnya reformasi. Ide pembentukan Negara Islam, penerapan hukum Islam (*Syari'ah*) dan penolakan terhadap dominasi barat sangat dominan dalam *discours* beberapa kelompok radikal yang ada.¹⁰

Az-yumardi Azra melihat pada pasca orde baru lengser, ada fenomena baru gerakan *amar makruf nahi munkar* sebagai bagian dari gerakan Islam garis keras atau radikal.¹¹ Kesan garis keras itu agaknya pertama kali bisa terlihat dari nama dan terminology yang mereka gunakan. Terdapat kelompok-kelompok yang menggunakan nama nama seperti *jundullah* (tentara Allah), Laskar jihad, dan Hizbullah atau organisasi yang kelihatan lebih besar, seperti Front Pembela Islam.

⁸ *ibid*, hlm. 100

⁹ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 3

¹⁰ Musahadi HAM, *Mediasi dan Reolusi Konflik di Indonesia: dari Konflik agama hingga mediasi peradilan*, (Semarang:WMC IAIN Walisongo, 2007), hlm. 38

¹¹Az-Yumardi Azra, *Muslim Indonesia: Viabilitas "Garis Keras"* dalam Gatra, edisi khusus: 2000, hlm. 45

C. Pembacaan Gerakan FPI dalam Teori Fundamentalisme

Fundamentalisme bisa dimaknai sebagai paham untuk kembali kepada sesuatu yang dipandang sebagai dasar, pokok, dan asas. Pokok, dasar, dan asas itulah yang dianggap sebagai sesuatu “yang murni” dan “yang benar”, sehingga perlu dipertahankan mati-matian dari segala sesuatu yang bisa mengurangi “kemurnian” dan “kebenaran”. Paham tersebut hanya bisa dicari dan ditemukan melalui makna literal teks suci.¹² Kelompok ini meyakini bahwa perjuangannya tidak akan sia-sia, karena perjuangan itu dimaknai sebagai jihad (Islam) atau holy war (Kristen). Kalau toh kalah dalam perjuangan di dunia, di akhirat mereka yakin akan mendapat jaminan kemuliaan di sisi Tuhan.¹³

Pemahaman seperti ini biasanya anti kritik, anti nalar dan anti perubahan. Hal ini disebabkan ketidak sanggupannya menghadapi modernisasi dan proses sosial yang berlangsung cepat dan adanya sakralitas tradisi. Dari kondisi ini muncullah fundamentalisme agama. Sebagaimana diungkapkan John Naisbit dan Patricia *Aburdence dalam Megatrend 2000* yang mengungkapkan bahwa fundamentalisme adalah gerakan emosional reaksioner yang berkembang dalam budaya-budaya yang sedang mengalami krisis sosial dan bersifat tidak toleran, dan bersemangat memaksa dalam menampilkan dirinya terhadap masyarakat lain.¹⁴

Term fundamentalisme pada dasarnya merupakan istilah “netral” yang pada saat tertentu bisa bermakna positif, dan pada saat yang lain negative. Fundamentalisme bermakna positif dalam arti bahwa istilah itu menunjuk pada orang atau kelompok yang teguh dengan pendirian atas apa yang diyakini sebagai kebenaran. Sedangkan makna negative terletak pada kesulitan kelompok ini untuk melakukan akselerasi gagasan, melakukan dialog dengan kelompok lain yang dianggap sebagai “lawan”. Karena itu, “orang luar” melihat kelompok fundamentalis sebagai kelompok yang kaku dan tanpa kompromi, meskipun asumsi seperti ini tidak selamanya benar.

Fundamentalisme dalam Islam sebenarnya tidak semata-mata karena respon atas Barat, namun juga dapat muncul karena pergulatan internal dalam memaknai agama dan teks sucinya. Azyumardi Azra membuat dua tipe fundamentalisme dalam Islam, yaitu fundamentalisme *pra modern* dan *kontemporer*. Fundamentalisme *pra modern* dapat dilacak jauh ke belakang

¹² Nur khalik Ridwan, *Agama Borjuis Kritik Atas Nalar Islam Murni*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2004), hlm. 5

¹³ Rumadi, *Membongkar Akar-Akar Teologi Fundamentalisme Islam, Dalam Buku Dekonstruksi Islam Madzab Ngalyan*, (Semarang, Rasail: 2005), hlm. 4

¹⁴ Muhsin Jamil, *Membongkar Mito Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Liberal Versus Islam Literal*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2005), hlm. vi

pada masa awal sejarah Islam, yaitu gerakan kaum *khawarij* yang muncul pada masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dengan prinsip-prinsip radikal dan ekstrim ini yang mempengaruhi gerakan Islam fundamentalisme sepanjang sejarah. Sedangkan gerakan fundamentalisme kontemporer lebih banyak sebagai respon atas Barat, meskipun tema-tema yang berkaitan dengan pergulatan internal (*inward oriented*) tetap menjadi concern dan pilihan ideologis mereka.

Paling tidak ada dua masalah besar yang menjadi perhatian kelompok fundamentalisme ini. *Pertama*, mereka menolak sekulerisme masyarakat barat yang memisahkan agama dari politik, gereja dari Negara. Kesuksesan barat melakukan sekulerisasi yang terus merembes ke dalam Islam di anggap sebagai sesuatu yang berbahaya, karena dapat mengancam Islam sebagai agama yang tudaj hanya mengurus masalah ukhrawi, tapi juga dunia. *Kedua*, banyak umat Islam yang menginginkan agar ajaran Islam/syari'at Islam sebagai aturan hukum bernegara. Kemunduran umat Islam di berbagai belahan dunia dalam mengelola pemerintahan, menurut kelompok ini karena mereka tidak lagi menggunakan syari'at Islam sebagai acuannya. Fundamentalisme dapat menjadi semacam ideology yang menjadikan agama sebagai pegangan hidup oleh masyarakat maupun individu. Fundamentalisme akan diiringi oleh radikalisme dan kekerasan ketika kebebasan untuk kembali kepada agama tadi dihalangi oleh situasi sosial politik yang mengelilingi masyarakat.¹⁵

Tarmizi Taher, mantan menteri agama di era orde baru, menganalisi bahwa kemunculan fundamentalisme agama di latar belakang oleh faktor-faktor sebagai berikut: *pertama*, pemahaman agama yang salah dan parsial. *Kedua*, Kemiskinan dan keputusan dalam menghadapi hidup. *Ketiga*, Penindasan dan kesewenang-weanangan dari penguasa atau kelompok yang lebih kuat kepada kelompok yang lebih lemah. *Keempat*, Lemahnya penegakan hukum oleh aparat, terutama jika kemaksiatan dan kemungkaran dibiarkan semakin merajalela secara mencolok di depan mata kaum muslimin.¹⁶

Dengan meminjam teori sosiolog agama Martin E. Marty, Az-Yumardi Azra memberikan ciri-ciri kelompok fundamentalis sebagai berikut: *Pertama*, selalu mengadakan perlawananan (oposisi) terhadap pandangan yang dianggap mengancam agamanya. Menentang modernisme termasuk di dalamnya otonomi individual, hegemoni nalar, dan ideology kemajuan. *Kedua*, menolak pandangan kritis terhadap Alquran. Meyakini bahwa kitab suci itu

¹⁵ Endang Turmudi, Riza Sihbudi, *Islam Dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta:LIPi Pres, 2005), hlm. 5

¹⁶ Tholhah Choir, Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 433

tak bisa dan tak akan pernah salah termasuk penafsiran mereka sendiri akan teks-teks suci itu. Hanya penafsiran yang berasal dari kelompoknya sajalah yang benar sementara yang lain salah. *Ketiga*, dalam kaca mata penganut fundamentalisme, hanya ada dua pilihan, jadi pelayan Tuhan atau pelayan setan. *Keempat*, cenderung bersikap tertutup terhadap kelompok lain, namun sangat kuat ikatan persaudaraan sesama anggota. *Kelima*, cenderung bersikap reaktif, defensive, dan selektif serta tak segan-segan menggunakan jalan kekerasan untuk merealisasikan tujuannya.¹⁷

Pemahaman Islam literal dan gejala fundamentalisme Islam cenderung menafikan pluralisme pemahaman keagamaan dan pluralisme agama. Dan yang lebih parah lagi menolak hampir semua konsep Negara modern seperti demokrasi, civil society, dan HAM. Penolakan-penolakan ini pada akhirnya membangkitkan mitos sistem khilafah islamiyah dengan salah satu konstitusinya mengacu pada piagam madinah.¹⁸

Demikian halnya dengan asumsi mengenai teori fundamentalisme. Dilihat dari pola gerakan, karakter pemikiran, dan konstruksi sosial FPI, ia termasuk kelompok fundamentalis, sebagaimana di asumsikan oleh banyak orang. Untuk memperkuat argumentasi ini, kita bisa melihat beberapa pernyataan dan ketentuan yang di jadikan pedoman oleh para aktivis gerakan FPI. Sebagaimana prakteknya di lapangan, untuk melakukan *amar makruf nahi munkar*, gerakan ini lebih menonjolkan aksi kekerasan, intimidasi, ancaman, terror, aksi sweping, dll.

Jika FPI dikaitkan dengan gerakan Islam radikal di Indonesia, maka FPI termasuk salah satu contoh ormas yang bisa di katakan sebagai gerakan Islam radikal. ¹⁹ Dalam konteks inilah ormas Islam seperti FPI memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, mereka memperjuangkan Islam secara kaffah (totalistik), syariat Islam sebagai hukum Negara, Islam sebagai sistem politik. *Kedua*, mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy). *Ketiga*, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi. *Keempat*, perlawanannya dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan muslim Indonesia. Itu sebabnya, ormas Islam seperti FPI ini bisa dimasukkan dalam kategori Islam radikal.²⁰ Dengan pembacaan tersebut, nampaknya relevan dan cukup memadai untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena

¹⁷ Sudarto, *Konflik Islam Kristen; Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama Di Indonesia*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 149

¹⁸ Muhsin Jamil, *Op.Cit.*, hlm. vi

¹⁹ Endang Turmudi, *Op.Cit.*, hlm. vii

²⁰ Khamami Zada, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 17

gerakan Islam radikal FPI. Sebab, secara factual, terlihat jelas bahwa kemunculan gerakan Islam radikal FPI ini didasari oleh kesadaran ideologis untuk menerapkan suatu konstruksi pemikiran teologis secara kaku dan ideologis.

Selain stigma radikal dan fundamental yang dilakukan oleh FPI, ada hal yang menarik untuk dikaji bersama, tentang hasil penelitian yang dilakukan al-Zastrouw (2006) dalam bukunya "Gerakan Islam Simbolik Politik Kepentingan FPI". Kajian buku ini mengajak kita untuk mencermati secara kritis segala sesuatu yang terkait dengan gerakan Islam dengan menggunakan simbol-simbol agama di setiap aksi atau gerakan yang mereka (FPI) lakukan, cermin dari adanya proses komodifikasi dan politisasi agama dalam proses sosial. Dalam gerakan ini, Islam hanya berfungsi sebagai alat legitimasi gerakan politik. Sebab, pada hakikatnya gerakan ini hanya merupakan perpanjangan tangan dari suatu kekuatan politik yang sebenarnya tidak memiliki spirit keagamaan. Di sini, penggunaan simbol, bahasa, dan tokoh Islam hanya sebagai bungkus untuk menutupi kepentingan politik yang sedang dimainkan.²¹

Apa yang terjadi dengan gerakan Islam radikal FPI menunjukkan kecenderungan yang demikian. Sebagian orang selalu mengira bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi suatu norma Islam (keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran). Secara faktual, sebagian besar ajaran Islam tersebut tidak di praktekan. Karena mereka justru telah melakukan eksploitasi terhadap kelompok lain. Eksploitasi ini terlihat dalam sikap para aktivis FPI yang melakukan pemerasan terhadap beberapa pengusaha hiburan. Mereka melakukan penggerebekan tempat tersebut atas nama memberantas kemaksiatan. Dengan demikian, apa yang terjadi pada gerakan FPI menunjukkan bahwa proses "pemberantasan kemaksiatan" dengan konsep *amar makruf nahi munkar* tersebut tidaklah didasarkan atas suatu norma atau hukum, tetapi lebih didasarkan pada proses pertukaran kepentingan antara FPI dan pengusaha hiburan.²²

Dengan demikian, gerakan yang dilakukan FPI yang secara retorik untuk kebaikan dan kemaslahatan agama, sama sekali tidak terbukti dalam realitas objektif. Sebab gerakan tersebut justru menimbulkan banyak kerusakan dan kepanikan di kalangan masyarakat. Klaim-klaim suci membela

²¹ Al-Zastrouw Ng, *Op.Cit*, Hal. 111

²² FPI menjalin kerjasama yang bersifat formal, yang bentuk dan format gerakannya bisa dilihat secara terbuka. Dan ada juga ada bentuk kerjasama yang tertutup yang dilakukan oleh para elit FPI dengan kekuatan strategis di Indonesia, yaitu kekuatan militer dan pengusaha. Al-Zastrouw Ng...hal. 114

agama, menegakkan syariat Islam, dan memberantas kemaksiatan, ternyata hanya sekedar retorik untuk mengambil simpati dan legitimasi publik.

D. Reinterpretasi Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar di Indonesia

Term dakwah, pada substansinya bukan hanya berarti mengajak mad'u untuk beriman dan beribadah kepada Allah, tetapi juga bermakna menyadarkan manusia terhadap realitas hidup yang harus mereka hadapi, dan berusaha mengajak kepada kondisi masyarakat yang lebih maju, sejahtera, bahagia, damai, makmur dan Islami dengan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun, persolannya adalah bagaimanakah praktik yang dibenarkan dalam proses dakwah tersebut. Sehingga, doktrin *amar makruf nahi munkar* ini tidak dipakai oleh kaum muslim untuk membenarkan perilaku *intoleran* dan bahkan tindak kekerasan kepada orang lain. Firman Allah dalam QS. Ali Imron; 104 menyebutkan "*dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, merekalah yang beruntung*". Jika ayat tersebut di pahami secara literal akan menumbuhkan sikap intoleransi pada pemeluknya yang berujung pada tindak kekerasan.²³

Term *amar makruf* adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan *nahi munkar* adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang di anggap buruk oleh syara' dan hukum akal. Ruang lingkup penerapannya sangat luas dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerja kolektif dari seluruh elemen umat Islam untuk melaksanakannya.

Dengan demikian, hendaknya dalam berdakwah lebih baik menghindari praktek "menghalalkan segala cara" untuk mencapai tujuan dakwah yang mulia, karena aktivitas dakwah tersebut telah memasuki intern wilayah privasi orang lain, sehingga tidak mengganggu harkat dan martabat serta nilai-nilai universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka untuk mencari format yang relevan dalam berdakwah, ada beberapa hal yang perlu di agendakan;

Pertama, redefinisi tentang konsep dakwah, konsep dakwah hendaknya dirubah pemahamannya, misi/dakwah tidak boleh bertentangan dengan tugas suci dakwah sebagai *rahmatan lil alamin*, yaitu menjunjung tinggi harkat dan

²³ Ilyas Supena, *Filsafat Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Ilmu Sosial*, (Semarang: Abshor, 2007), hlm. 145

martabat umat manusia. Pemahaman dakwah yang ditafsirkan sebagai usaha *meng-agamakan* orang/sekelompok orang yang sudah beragama, harus dibuang jauh-jauh karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Bahkan, misi/dakwah semacam ini bisa dibilang sebagai misi yang bertentangan dengan tugas suci agama-agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Ahmad Tohari (2011) mengingatkan agar konsep tentang model dakwah yang masih *feodal*, berupa memperbanyak umat agar dimodifikasi lagi. Sehingga tidak terjadi perpecahan umat seagama maupun antar umat beragama. Sebab, konsep-konsep menambah umat, berpotensi mendatangkan masalah. Upaya untuk meningkatkan kualitas umat, siapapun, agama apapun akan jauh lebih bermanfaat. Sehingga agama menurut Ahmad Tohari adalah sebagai pakaian. Dengan beragama, manusia menjadi lebih beradab, bukan malah tidak beradab.²⁴ Dengan demikian, dakwah konvensional sudah harus ditinggalkan, dakwah harus diubah menjadi dakwah *kualitatif*, yaitu misi/dakwah yang mengemban tugas-tugas kemanusiaan umat beragama. Berdakwah secara kualitatif dimaksudkan untuk mewujudkan misi/dakwah yang mengemban tugas-tugas kemanusiaan umat beragama secara universal. Tugas-tugas kemanusiaan agama-agama inilah yang sebenarnya juga menjadi bagian terpenting dari menghadirkan agama-agama dalam arus globalisasi.²⁵

Kedua, dalam mencapai tujuan dakwah (*amar makruf nahi munkar*), hendaknya dilakukan dengan lebih mengutamakan metode bijaksana dan lemah lembut melalui langkah-langkah: mangajak dengan hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi mau'idzah hasanah (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik (Qs. An-Nahl: 125).

Sedangkan dalam melakukan *nahi munkar*, FPI hendaknya mengutamakan sikap yang tegas melalui langkah-langkah: menggunakan kekuatan/ kekuasaan bila mampu dan menggunkan lisan dan tulisan, bila kedua langkah tersebut tidak mampu dilakukan maka nahi munkar dilakukan dengan menggunakan hati, yang tertuang dalam ketegasan sikap untuk tidak menyetujui segala bentuk kemungkaran. Selain dari itu semua, dakwah hendaknya tidak ditempuh dengan pendekatan *defensive* (banyak menonjolkan *nahi munkar*), tetapi dengan mengedepankan pendekatan *ofensif* (banyak menonjolkan *amar ma'ruf*) yang justru arah inilah yang lebih banyak

²⁴Ahmad Tohari, *Mengubah Konsep Dakwah Demi Kerukunan*, dalam Suara NU, Edisi 02/April/2011, hlm.19

²⁵Zuli Qadir, *Syariah Demokratik, Pembersihan Syariah Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2004), hlm. 20

ditempuh oleh nabi dan para sahabat yang sukses membangun dan membina kultur Islam selama masa kejayaan dunia Islam.²⁶

Perlu pendekatan yang lebih *humanis*, dalam rangka mewujudkan gerakan anti kekerasan, dengan berupaya aktif menebarkan perdamaian demi tegaknya hak asasi manusia untuk hidup damai. Hidup damai merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia (*human basic needs*) yang menjadi hak asasinya yang paling *urgen* ditengah keberbangsaan. Doktrin kekerasan, dalam konteks kebangsaan dapat merusak stabilitas Negara. Keangkuhan, kesombongan, dan cinta berlebihan terhadap keyakinan agama bakal memicu ketegangan konflik. Padahal dalam perpektif *multikulturalisme*, *the others* merupakan unsur terpenting dari realitas sosial di negeri yang terbuka dan demokratis. Maka kesadaran mengakui *the others* adalah fondasi kehidupan sosial dalam menjalankan aktivitas kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan, dan keberagamaan.²⁷

Ketiga, aktivitas dakwah hendaknya lebih menekankan pada sisi *substansial* ketimbang mendahulukan simbol/baju agama.²⁸ Yaitu dengan mengutamakan sistem penanaman “nilai-nilai Islam” kedalam jiwa manusia. Tidak perlu mendahulukan “symbol dan jargon keislaman” dalam berdakwah. Simbol-simbol itu hanyalah ungkapan-ungkapan yang tidak dipahami dan kadang-kadang inti darinya tidak dimengerti oleh banyak orang. Berbeda dengan cara berdakwah yang tidak menggunakan simbol sebagai tanda ke Islaman seseorang, akan tetapi menggunakan sistem penanaman “nilai-nilai Islam” dalam jiwa manusia.²⁹ Gejala Islamisasi ruang publik di era sekarang bukan persoalan sederhana, mengingat sifatnya yang plural dan multikultural, dimana berbagai sistem nilai, identitas, ideologi bersaing. Dalam praktiknya, penerapan syari’ah Islam di beberapa wilayah dan daerah ternyata masih menyimpan banyak persoalan yang harus kita selesaikan bersama, demi terciptanya masyarakat yang demokratis, adil, dan tidak mencederai kemanusiaan. Bahtiar Effendi menganggap jika konsepsi perda syariah yang hanya sibuk mengatur soal baju/simbol agama justru akan mereduksi makna

²⁶Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Persoalan Agama Dan Kemanusiaan*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 88

²⁷ Abu Hafsin, *Kebebasan Beragama Dalam Konteks Demokrasi Dan Hukum Indonesia, Dalam Suara NU* edisi 01/ Maret/2011, hlm. 16.

²⁸ Clifford Geert, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terjemahaan Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1983), hlm. 276.

²⁹ Lukman Hakim, dkk, *Syari’ah Sosial Menuju Revolusi Kultural*, (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm. 241

syariat dalam kehidupan muslim. Perda syariah ini bertentangan dengan *trademark* Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.³⁰

Wajah Islam seharusnya tidak menampilkan diri dalam bentuk *eksklusif*, yakni tidak menampilkan simbol dan baju keislamannya, tetapi mengintegrasikan kegiatannya dalam kegiatan bangsa secara menyeluruh. Islam juga harus dihindarkan agar tidak diletakkan di bawah wewenang Negara, melainkan menjadi kesadaran kuat dari warga masyarakat. Hal ini berarti meletakkan Islam sebagai kekuatan transformative kepada masyarakat, berarti cita-cita civil Islam adalah memfokuskan perjuangan pada penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas dan jiwa transformatif yang prihatin terhadap nasib kaum tertindas.³¹ Sudah saatnya Islam tidak boleh dijadikan “simbol”, melainkan sebagai sistem etika sosial yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

Pengatasnamaan agama oleh FPI selalu dilakukan tanpa ragu, sehingga terkesan seolah hanya merekalah yang beragama. Mereka seakan memonopoli kebenaran Tuhan. Mereka tak hanya mengambil alih fungsi polisi, tetapi juga seakan ingin mengambil alih hak prerogatifnya dalam konteks kebenaran. Mengingat banyak perbuatan destruktif yang dilakukan atas nama agama, maka perlu ada aturan main yang dapat menertibkan lalu lintas hak kebebasan beragama. Untuk tujuan inilah kebebasan harus dilihat dari dua dimensi: dimensi *internal* dan dimensi *eksternal*. Kebebasan nurani masuk dalam dimensi internal sedangkan kebebasan mengekspresikan ajaran agama, kebebasan membentuk asosiasi keagamaan serta kebebasan melembagakan ajaran agama masuk dalam dimensi eksternal. Jika dimensi internal sifatnya absolute, maka dimensi eksternal bersifat relative, dalam arti bahwa hak untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan, hak melembagakan ajaran agama serta hak untuk membentuk asosiasi keagamaan terkait erat dengan institusi sosial lainnya seperti hukum dan politik.³²

Dengan demikian, jika agama mengajarkan pada para penganutnya untuk menghormati orang lain, hidup berdampingan dengan harmonis dan semua itu sejalan dengan spirit humanisme, maka kekerasan atas nama agama bisa jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara semangat keberagamaan dan kemampuan untuk memahami ajaran agama. Semangat keberagamaan yang tinggi tanpa disertai pemahaman yang mendalam akan dimensi *esoteric*

³⁰ Nazar Nurdin, *Perda Syari'at Dan Ketertiban Sosial: Sebuah Perbandingan, Dalam Islam Politik Di Panggung Kuasa Jurnal Justisia*, Edisi 38, Th XXII/2012, hlm. 78

³¹ M. Muhsin Jamil, *Revitalisasi Islam Kultural (Arus Baru Relasi Agama dan Negara)*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 245

³² Abu Hafsin, *Kebebasan Beragama Dalam Konteks Demokrasi Dan Hukum Indonesia, Dalam Suara NU* edisi 01/ Maret/2011, hlm. 16

dari agama dapat mengarahkan manusia pada sikap *fanatic*, sikap keberagamaan yang sempit dan fundamentalisme.³³

Doktrin agama yang sempit dan kaku, setidaknya mampu mempengaruhi dan memotivasi perilaku para penganutnya. Maka, ketika agama dipahami sebagai ideology yang maha benar, akan terjadi peminggiran terhadap penganut keyakinan tertentu atau agama lain. Semua orang yang beragama bahkan yang tidak beragama sekalipun, pasti kalau mempunyai ruhani, segala perbuatan dan bentuk kekerasan, radikalisme, teror merupakan perbuatan terkutuk dan biadab. orang bisa jadi radikal banyak penyebabnya. Antara lain; adanya pemahaman keagamaan yang sempit, konflik nilai, mengalami split personality, dan emosional. Orang yang emosional antara lain disebabkan karena pemahaman agamanya tidak ketemu dengan kenyataan yang dihadapi. Kehidupan yang dialami tidak sesuai dengan pemahaman agamanya. Dirinya menghendaki Indonesia menjadi Negara Islam, tetapi nyatanya negaranya tidak kunjung menjadi Negara Islam, maka potensi emosinya meledak.³⁴

E. Kesimpulan

Dengan berbagai aksi kekerasan yang dilakukannya selama ini, Front Pembela Islam (FPI) telah mengokohkan posisinya sebagai 'duri dalam daging' di tubuh bangsa ini. Pengatasnamaan agama oleh FPI selalu dilakukan tanpa ragu, sehingga terkesan seolah hanya merekalah yang beragama. Mereka seakan memonopoli kebenaran Tuhan. Mereka tak hanya mengambilalih fungsi polisi, tetapi juga seakan ingin mengambilalih hak prerogatif Dia yang di atas dalam konteks kebenaran. Namun, di balik gerakan yang terlihat idealis dan fundamental tersebut, ternyata FPI memiliki sejumlah kepentingan politik dan ekonomi yang tersembunyi. Kepolisian diharapkan bisa tegas menindak FPI maupun organisasi-organisasi dengan perilaku sejenis.

Hingga sejauh ini belum semua kalangan di Indonesia bisa dianggap betul-betul siap untuk menjalankan demokrasi dengan baik dan benar. Rigiditas pemahaman doktrin agama menjadi pemicu lahirnya kekerasan di negeri multikultural dan multi agama di Indonesia. Kekerasan, yang dibumbui doktrinasi agama, politik kekuasaan, dan perbedaan etnis. Sehingga, simbol dan jargon perjuangan dakwah "amar makruf nahi munkar" Front Pembela Islam (FPI) penting di kaji ulang disesuaikan dengan realitas kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya.

³³Abu Hapsin, dkk, *Islam Dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisi Humanisme Universal*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007), hlm. vii

³⁴ Suara NU, Edisi 01/Maret/2011, hlm. 8

Sebagai penegak hukum, norma, dan tatanan sosial di masyarakat biarlah menjadi tanggung jawab negara (pemerintah). Agama hendaknya dijadikan sebagai alat untuk melakukan *transformasi sosial*, dengan syarat agama tidak dipahami secara kaku, emosional dan dogmatis, tetapi dipahami secara rasional, substantif, humanis, dan transformatif. Untuk itu perlu adanya kerangka paradigma dakwah yang komprehensif agar berfungsi secara maksimal bagi kebaikan hidup umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Abdul, dkk, *Gerakan Islam Kontemporer Indonesia*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,1989).
- Choir, Tholhah, Ahwan Fanani, *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Fred W. Riggs, “*Modernisasi Dan Persoalan-Persoalan Politik: Beberapa Prasyarat Pembangunan*”, *Dalam Beling Dan Totten* (ed), *Modernisasi model pembangunan*, cet. II, (Jakarta: Yayasan ilmu-ilmu Sosial dan Rajawali Prsess,1985).
- Geert, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, terjemahaan Aswab Mahasin, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1983).
- Hakim, Lukman dkk, *Syari’ah Sosial Menuju Revolusi Kultural*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang: 2004)
- Halimi, Safroodin, *Etika Dakwah Dalam Perspektif Alquran Antara Idealitas Al-Quran dan Realitas Sosial*, (Semarang: Walisongo Press, 2008).
- Hapsin, Abu dkk, *Islam Dan Humanisme, Aktualisasi Humanisme Islam Di Tengah Krisi Humanisme Universal*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2007).
- Jamhari, Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) .
- Jamil, M. Muhsin, *Revitalisasi Islam Kultural (Arus Baru Relasi Agama dan Negara)*, (Semarang: Walisongo Press: 2009).
- _____, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar, Pergulatan Islam Liberal Versus IIslam Literal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)
- Kholiludin, Tedi (ed), *Runtuhnya Negara Tuhan Membongkar Otoritarianisme Dalam Wacana Politik Islam*, (Semarang: INSIDE PMII Komisariat Walisongo Semarang, 2005).
- Mahfudz, Ali, *Hidayat Al-Mursyidin*, (Kairo: Dar kutub al-Arabiyah, 1952).
- Musahadi HAM, *Mediasi dan Reolusi Konflik di Indonesia: dari Konflik agama hingga mediasi peradilan*, (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007).
- Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Jilid II, Cet. Kedua. (Beirut: Dar al-Fikr, 1978M/1398).

- Nurdin, Nazar, *Perda Syari'at Dan Ketertiban Sosial: Sebuah Perbandingan, Dalam Islam Politik Di Panggung Kuasa Jurnal Justisia*, Edisi 38, Th XXII/2012
- Ng, Al-Zastrouw, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LKiS, 2006).
- Obert Voll, John, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997).
- Pimay, Awaludin, *Metodologi Dakwah: Kajian Teoritis dari Khazanah al-Qur'an*, (Semarang: RaSAIL, 2006)
- Qadir, Zuli, *Syariah Demokratik, Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ridwan, Nur Khalik, *Agama Borjuis Kritik Atas Nalar Islam Murni*, (Yogyakarta: Arruz Media, 2004).
- Rumadi, *Membongkar Akar-Akar Teologi Fundamentalisme Islam, Dalam Buku Dekonstruksi Islam Madzab Ngaliyan*, (Semarang: Rasail, 2005).
- Shulton, Muhammad, *Desain Ilmu Dakwah, Kajian Ontologis, Epistemologis Dan Aksiologis*, (Semarang: Pustaka Pelajar dan Walisongo Press, 2003).
- Suara NU, Edisi 01/Maret/2011.
- Suara NU; *Menjaga Tradisi, Membangun Moderasi Dan Toleransi*, PWNU Jawa Tengah edisi 01 Maret 2011.
- Sudarto, *Konflik Islam Kristen; Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Supena, Ilyas, *Filsafat Ilmu Dakwah Perspektif Filsafat Ilmu Sosial*, (Semarang: Abshor, 2007).
- Turmudi, Endang, Riza Sihbudi, *Islam Dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Pres, 2005).
- Zada, Khamami, *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, (Jakarta: Teraju, 2002).

[Http://Www.Wahidinstitute.Org/Wahid D/Images/Upload/Dokumen/40_Mrori_Bahasa.Pdf](http://www.wahidinstitute.org/wahid_d/images/upload/dokumen/40_mrori_bahasa.pdf), 2012, di akses tanggal 7 Juni 2013.

[Http://Blog.Unikom.Ac.Id/10507276/4ph.Front-Pembela-Islam-Fpi--Kalo - Pengin-Jakarta-Chaos-Silakan-Gelar-Saja-Konser-Lady-Gaga. Html/](http://blog.unikom.ac.id/10507276/4ph.front-pembela-islam-fpi--kalo-pengin-jakarta-chaos-silakan-gelar-saja-konser-lady-gaga.html) 2012, di akses tanggal 10 Juni 2013

[Http://Socio-Politica.Com/2013/07/24/Fpi-Sebagai-Duri-Dalam-Daging-Di-Tubuh-Bangsa/](http://socio-politica.com/2013/07/24/fpi-sebagai-duri-dalam-daging-di-tubuh-bangsa/), diunduh tanggal 25 Nopember 2013